BAKTI MES
Lembaga Pendidikan dan Penelitian
Masyarakat Ekonomi Syariah

LP UMKM
MUHAMMADIYAH

BAKTI Policy Brief No.1/2026

Transformasi Ekonomi Syariah sebagai Strategi Ketahanan Ekonomi Nasional

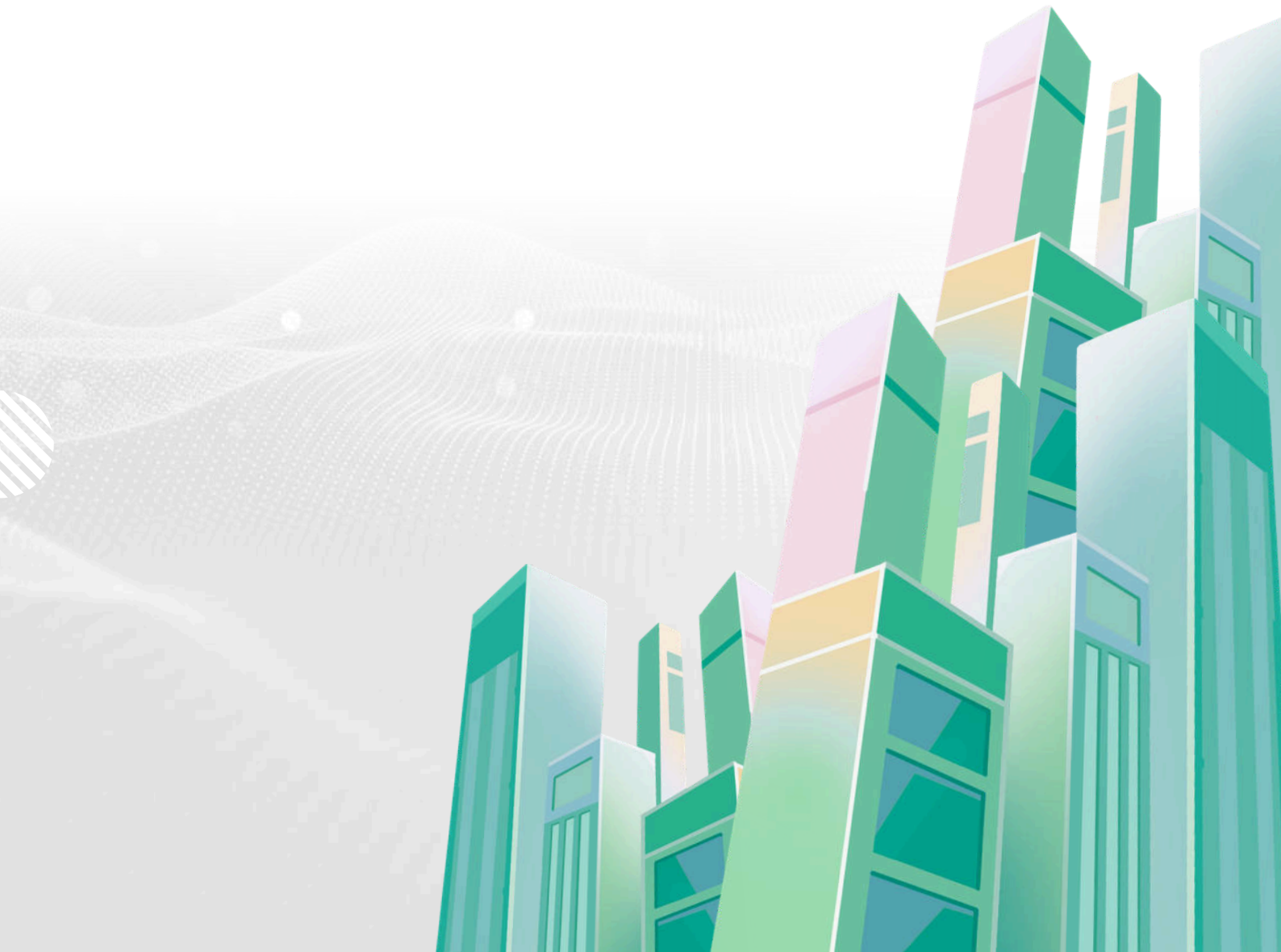

Geopolitical Turbulence dan Masa Depan UMKM Indonesia: Transformasi Ekonomi Syariah sebagai Strategi Ketahanan Ekonomi Nasional

Ronald Rulindo, PhD.
Ketua Lembaga Pendidikan dan Penelitian Masyarakat Ekonomi Syariah (BAKTI MES)

Fadhil Akbar Purnama. M.Sc.
Peneliti Senior Lembaga Pendidikan dan Penelitian Masyarakat Ekonomi Syariah (BAKTI MES)

Rijalul Humam, SE., RIFA., CDM.
Asisten Peneliti Lembaga Pendidikan dan Penelitian Masyarakat Ekonomi Syariah (BAKTI MES)

Ringkasan Eksekutif

Lanskap ekonomi global saat ini tidak lagi sekadar mengalami fluktuasi, melainkan guncangan fundamental akibat *geopolitical turbulence*. Konflik di Timur Tengah, fragmentasi perdagangan internasional, gangguan rantai pasok, serta meningkatnya ketidakpastian pasar energi telah menekan proyeksi pertumbuhan dan menaikkan inflasi dunia, dengan dampak yang paling berat dirasakan oleh negara berkembang, termasuk Indonesia (International Monetary Fund [IMF], 2026; World Bank, 2026a). Dampak tersebut tidak hanya tercermin pada meningkatnya harga energi dan volatilitas nilai tukar, tetapi juga memengaruhi struktur biaya produksi, daya beli masyarakat, serta keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2023; World Bank, 2024).

Policy brief ini berangkat dari pertanyaan mendasar: apakah kebijakan pengembangan UMKM yang selama ini dijalankan masih relevan untuk menghadapi tantangan geopolitik yang semakin kompleks? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, analisis makroekonomi berbasis data terkini dipadukan dengan hasil *Roundtable Discussion* yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Penelitian Masyarakat Ekonomi Syariah (Bakti MES), LP UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Menara Syariah dengan melibatkan regulator, industri jasa keuangan, akademisi, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha.

Policy brief ini menghasilkan 5 (lima) temuan strategis. Pertama, tantangan utama UMKM telah bergeser dari keterbatasan akses pembiayaan menuju lemahnya akses pasar, ketidakpastian permintaan, serta belum terintegrasinya UMKM ke dalam rantai nilai industri. Kedua, Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan program pengembangan UMKM, namun berbagai program tersebut masih berjalan secara sektoral sehingga belum membentuk ekosistem yang mendorong UMKM naik kelas secara sistematis. Ketiga, bank syariah memiliki peluang untuk menjadi

penggerak halal value chain melalui integrasi pembiayaan, pendampingan usaha, keuangan sosial syariah, business matching, dan pengembangan akses pasar, bukan sekadar penyedia pembiayaan. Keempat, *geopolitical turbulence* juga membuka peluang melalui restrukturisasi rantai pasok global dan pertumbuhan pasar halal dunia yang diproyeksikan mencapai USD 3,56 triliun pada 2029 (DinarStandard, 2026). Kelima, tantangan terbesar saat ini adalah belum adanya kelembagaan yang mampu mengorkestrasi implementasi kebijakan lintas sektor secara terpadu.

Berdasarkan temuan tersebut, *policy brief* ini mengusulkan 5 (lima) agenda transformasi kebijakan. Pertama, menggeser orientasi kebijakan dari pendekatan berbasis pembiayaan menuju penciptaan pasar (*market-led development*) melalui *National Off-taker Partnership Program*, sejalan dengan pendekatan pengembangan UMKM yang berorientasi pada produktivitas, integrasi pasar, dan peningkatan daya saing (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2023; World Bank, 2024). Kedua, mentransformasi bank syariah menjadi penggerak *halal value chain* nasional melalui integrasi pembiayaan, pendampingan usaha, dan penguatan ekosistem halal (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah [KNEKS], 2023; Bank Indonesia, 2025). Ketiga, mengintegrasikan seluruh program pengembangan UMKM ke dalam satu ekosistem nasional yang terukur melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan sektor keuangan (OECD, 2023). Keempat, memperkuat tata kelola melalui transformasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah (BPES) sebagai *national development agency* yang memiliki mandat koordinasi lintas sektor. Kelima, menjadikan perubahan geopolitik sebagai momentum untuk mempercepat pengembangan industri halal dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah dunia (DinarStandard, 2026; KNEKS, 2023).



Pada akhirnya, *geopolitical turbulence* tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai ancaman. Dengan strategi yang tepat, kepemimpinan yang kuat, serta kelembagaan yang mampu mengintegrasikan kebijakan secara efektif, perubahan lanskap ekonomi global dapat menjadi katalis bagi transformasi UMKM, penguatan industri halal, dan percepatan pembangunan ekonomi syariah Indonesia.

1 Latar Belakang

Perekonomian global memasuki fase ketidakpastian yang semakin kompleks. Berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya yang umumnya dipicu faktor ekonomi atau keuangan, dinamika saat ini dipengaruhi secara simultan oleh konflik geopolitik, keamanan energi, perdagangan internasional, dan stabilitas sistem keuangan global, sehingga risiko terhadap perekonomian dunia menjadi semakin sulit diprediksi.



International Monetary Fund (IMF) dalam *World Economic Outlook* edisi April 2026 menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,1% pada tahun 2026, turun dari proyeksi sebesar 3,3% yang dipublikasikan pada Januari 2026. IMF juga memperkirakan inflasi global meningkat menjadi 4,4% (IMF, 2026). Dalam skenario dasar (*baseline scenario*), IMF mengasumsikan bahwa konflik di Timur Tengah berlangsung secara terbatas. Namun, apabila konflik meluas atau menyebabkan gangguan yang lebih besar terhadap infrastruktur energi di kawasan, prospek pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan semakin melemah disertai peningkatan tekanan inflasi (IMF, 2026).

Konflik di Timur Tengah, termasuk gangguan pada jalur Selat Hormuz yang menjadi rute sekitar 35% perdagangan minyak mentah dunia melalui laut, telah memicu guncangan pasokan energi terbesar sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 (World Bank, 2026a).

Bank Dunia, dalam *Commodity Markets Outlook* edisi April 2026 memproyeksikan harga energi dunia naik sekitar 24% dan harga komoditas secara keseluruhan naik 16% sepanjang 2026, dengan harga pupuk diperkirakan naik 31% (termasuk lonjakan harga urea sekitar 60%) dan harga minyak mentah Brent diperkirakan rata-rata USD 86 per barel pada skenario dasar, serta dapat mencapai USD 115 per barel apabila gangguan pasokan berlangsung lebih lama (World Bank, 2026a). Rincian dampak harga energi terhadap biaya produksi UMKM dibahas lebih lanjut pada Bagian 2.1.

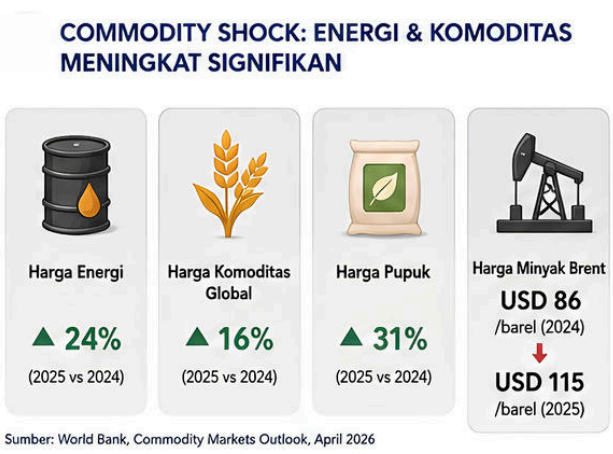

Gangguan tersebut turut memperlambat perdagangan dunia. *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) memperkirakan pertumbuhan perdagangan barang dunia melambat dari 4,7% pada 2025 menjadi hanya 1,5–2,5% pada 2026, seiring meningkatnya biaya logistik, premi asuransi pelayaran, dan tekanan terhadap nilai tukar serta biaya pembiayaan di berbagai negara berkembang (UN Trade and Development, 2026).

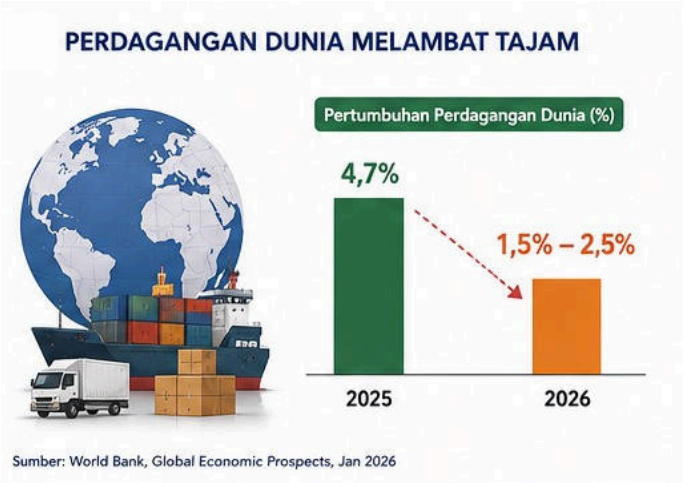

Meskipun Indonesia relatif mampu menjaga stabilitas makroekonomi dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya, tekanan eksternal mulai terasa nyata. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Indonesia meningkat menjadi 3,34% *(year-on-year)* pada Juni 2026, naik dari 3,08% pada Mei 2026 dan mendekati batas atas sasaran inflasi Bank Indonesia sebesar 2,5% ± 1% (BPS, 2026a). Pada Mei 2026, Indonesia mencatat defisit neraca perdagangan sebesar USD 1,61 miliar—defisit pertama setelah 72 bulan surplus beruntun sejak Mei 2020—yang terutama dipicu oleh defisit neraca migas sebesar USD 3,76 miliar akibat melonjaknya impor minyak olahan dan minyak mentah di tengah tingginya harga energi global (BPS, 2026b). Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan tekanan inflasi, Bank Indonesia menaikkan suku bunga kebijakan (BI-Rate) secara kumulatif 100 basis poin sejak pertengahan Mei 2026, dari 4,75% menjadi 5,75% (Bank Indonesia, 2026b).

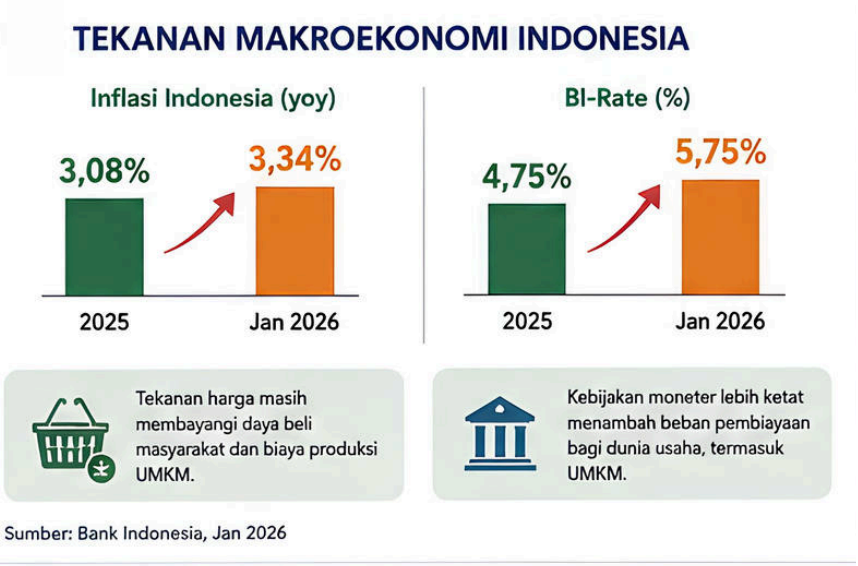

Di tengah kondisi tersebut, UMKM merupakan kelompok usaha yang relatif lebih rentan dibandingkan perusahaan besar. Berbeda dengan perusahaan besar yang umumnya memiliki diversifikasi usaha, akses pembiayaan yang lebih luas, serta kemampuan melakukan lindung nilai (*hedging*) terhadap fluktuasi harga dan nilai tukar, sebagian besar UMKM memiliki modal kerja yang terbatas, bergantung pada pasar domestik, serta memiliki kapasitas penyesuaian yang relatif sempit (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2023; World Bank, 2024). Kenaikan harga energi meningkatkan biaya produksi dan distribusi, pelemahan nilai tukar meningkatkan biaya bahan baku impor, sementara menurunnya daya beli masyarakat menekan permintaan terhadap produk UMKM (International Monetary Fund [IMF], 2026; World Bank, 2026a; World Bank, 2024). Kombinasi tekanan tersebut mempersempit margin usaha, menurunkan kemampuan investasi, serta meningkatkan risiko keberlanjutan usaha UMKM (OECD, 2023; World Bank, 2024).

Selama lebih dari dua dekade terakhir, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk memperkuat UMKM, mulai dari perluasan akses pembiayaan, peningkatan inklusi keuangan, digitalisasi usaha, sertifikasi halal, hingga berbagai program pelatihan dan pendampingan (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2021; Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Berbagai inisiatif tersebut telah memberikan fondasi yang kuat. Namun, meningkatnya kompleksitas risiko global menunjukkan bahwa tantangan UMKM saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan keterbatasan pembiayaan, melainkan telah bergeser menuju ketahanan rantai pasok, kepastian akses pasar, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global, serta keterhubungan antarprogram pembangunan (OECD, 2023; World Bank, 2024).

Dengan demikian, Indonesia memerlukan paradigma baru dalam pengembangan UMKM, dari perluasan jumlah program atau volume pembiayaan menuju pembangunan ekosistem yang menghubungkan pembiayaan, akses pasar, industri halal, inovasi, perdagangan, dan investasi secara terpadu. Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah memiliki posisi strategis karena mampu menghubungkan sektor keuangan dengan sektor riil melalui pendekatan berbasis rantai nilai (*value chain*) dan kemitraan (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2019). Pendekatan ini sejalan dengan tren global yang menekankan pentingnya penguatan ekosistem UMKM untuk meningkatkan daya saing, inovasi, serta ketahanan terhadap disrupsi ekonomi global (OECD, 2023; World Bank, 2024). Policy brief ini disusun untuk mengidentifikasi tantangan tersebut serta merumuskan agenda transformasi kebijakan dan kelembagaan yang diperlukan agar UMKM Indonesia mampu bertahan sekaligus memanfaatkan gejolak geopolitik sebagai momentum peningkatan daya saing nasional.

2 Transmisi Dampak *Geopolitical Turbulence* terhadap UMKM Indonesia

Geopolitical turbulence tidak memberikan dampak terhadap UMKM secara langsung. Dampak tersebut ditransmisikan melalui perubahan kondisi makroekonomi yang memengaruhi struktur biaya produksi, aktivitas perdagangan, stabilitas sektor keuangan, dan permintaan domestik. Berbeda dengan perusahaan berskala besar yang umumnya memiliki akses terhadap pembiayaan internasional, kemampuan *hedging*, serta diversifikasi pemasok dan pasar, sebagian besar UMKM Indonesia masih berorientasi pada pasar domestik dengan kapasitas keuangan yang relatif terbatas, sehingga menjadi kelompok usaha yang paling sensitif terhadap empat saluran transmisi berikut:



2.1. Kenaikan Harga Energi dan Biaya Produksi UMKM

Bank Dunia memperkirakan harga energi dunia meningkat sekitar 24% pada 2026 akibat konflik di Timur Tengah, dengan harga minyak mentah Brent diproyeksikan pada kisaran USD 86 per barel dalam skenario dasar dan berpotensi mencapai sekitar USD 115 per barel apabila gangguan pasokan berlangsung lebih lama. Harga pupuk dunia diperkirakan meningkat sekitar 31%, terutama akibat kenaikan harga gas alam yang merupakan bahan baku utama industri pupuk (World Bank, 2026a).

Bagi Indonesia, kenaikan harga energi tidak hanya meningkatkan nilai impor minyak, tetapi juga mendorong kenaikan biaya transportasi, logistik, distribusi, dan berbagai input produksi lainnya (Bank Indonesia, 2026a). Tekanan tersebut cenderung dirasakan lebih besar oleh UMKM karena skala usaha yang relatif kecil, keterbatasan modal kerja, serta ruang penyesuaian biaya yang lebih sempit dibandingkan perusahaan besar (OECD, 2023; World Bank, 2023). Berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki diversifikasi usaha, kemampuan menyerap sebagian kenaikan biaya, atau melakukan kontrak pembelian jangka panjang, UMKM umumnya harus menanggung kenaikan biaya produksi secara langsung, sementara ruang untuk menaikkan harga jual relatif terbatas karena tingginya sensitivitas konsumen terhadap harga. Akibatnya, kenaikan harga energi lebih banyak diterjemahkan menjadi penurunan margin usaha dibandingkan peningkatan harga jual.

2.2. Pelemahan Nilai Tukar, Biaya Produksi dan Modal Kerja

Ketidakpastian geopolitik turut meningkatkan volatilitas pasar keuangan global. Dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi, investor cenderung mengalihkan investasinya ke aset yang dianggap lebih aman (*flight to quality*), sehingga memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah—yang sempat melemah ke kisaran Rp17.600–17.700 per dolar AS pada Mei–Juni 2026 sebelum kembali menguat menyusul kenaikan BI-Rate (Bank Indonesia, 2026a).

Depresiasi nilai tukar meningkatkan harga bahan baku impor yang masih digunakan oleh berbagai sektor usaha di Indonesia, termasuk industri makanan dan minuman, tekstil, farmasi, kosmetik, dan elektronik (Bank Indonesia, 2026a). Kenaikan harga input tersebut tidak hanya meningkatkan biaya produksi, tetapi juga memperbesar kebutuhan modal kerja. Perusahaan besar umumnya memiliki kemampuan melakukan lindung nilai (*hedging*), diversifikasi pemasok, maupun memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih rendah. Sebaliknya, sebagian besar UMKM masih memiliki keterbatasan dalam kapasitas tersebut, sehingga pelemahan nilai tukar cenderung memberikan dampak yang lebih besar terhadap arus kas, kapasitas produksi, dan keberlanjutan usahanya.

2.3. Gangguan Rantai Pasok dan Efisiensi Produksi

Selain memengaruhi harga energi dan nilai tukar, konflik geopolitik juga mengganggu kelancaran perdagangan internasional. Meningkatnya risiko pelayaran, perubahan rute distribusi, kenaikan premi asuransi kapal, serta perlambatan arus barang menyebabkan biaya logistik global meningkat dan waktu pengiriman menjadi lebih panjang, sejalan dengan proyeksi perlambatan pertumbuhan perdagangan barang dunia yang disampaikan oleh (UN Trade and Development, 2026) pada Bagian 1.
Bagi UMKM Indonesia, kondisi tersebut meningkatkan ketidakpastian dalam memperoleh bahan baku maupun mendistribusikan produk. Banyak pelaku usaha perlu meningkatkan persediaan untuk mengantisipasi keterlambatan pasokan, namun strategi tersebut membutuhkan tambahan modal kerja yang tidak selalu tersedia. Akibatnya, sebagian UMKM berpotensi mengurangi kapasitas produksi, menunda ekspansi usaha, atau kehilangan peluang pasar akibat keterlambatan pemenuhan pesanan.

2.4. Dampak Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Daya Beli Masyarakat

Geopolitical turbulence juga memengaruhi sisi permintaan melalui kenaikan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter sebagaimana diuraikan pada Bagian 1: inflasi 3,34% *(yoy)* pada Juni 2026 (BPS, 2026a), kenaikan BI-Rate kumulatif 100 basis poin sejak Mei 2026 (Bank Indonesia, 2026b), serta defisit neraca perdagangan Mei 2026 (BPS, 2026b). Kombinasi kenaikan harga dan meningkatnya biaya pembiayaan menyebabkan rumah tangga cenderung menahan konsumsi, terutama terhadap barang dan jasa non-primer. Mengingat sebagian besar UMKM Indonesia masih mengandalkan pasar domestik sebagai sumber utama pendapatan, perlambatan konsumsi rumah tangga secara langsung menekan omzet usaha dan memperlambat perputaran modal kerja.

Dengan demikian, UMKM menghadapi tekanan dari dua sisi sekaligus. Dari sisi penawaran (*supply side*), biaya produksi terus meningkat akibat kenaikan harga energi, bahan baku, dan logistik. Dari sisi permintaan (*demand side*), penjualan mengalami perlambatan akibat melemahnya daya beli masyarakat. Kombinasi kedua faktor tersebut meningkatkan risiko penurunan profitabilitas, mempersempit ruang investasi, dan memperbesar kerentanan UMKM terhadap berbagai guncangan ekonomi.

2.5. *Up Side Risk*: *Geopolitical Turbulence* Sebagai Peluang

Meskipun meningkatkan berbagai risiko, perubahan geopolitik juga menciptakan peluang baru bagi Indonesia. Restrukturisasi rantai pasok global, meningkatnya kebutuhan diversifikasi sumber produksi, serta pesatnya pertumbuhan pasar halal internasional membuka ruang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam perdagangan global. Menurut *State of the Global Islamic Economy Report 2025/26*, belanja konsumen pada enam sektor utama ekonomi syariah global mencapai USD2,60 triliun pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD3,56 triliun pada 2029. Pada periode yang sama, belanja sektor makanan halal diproyeksikan meningkat dari USD1,53 triliun menjadi USD2,06 triliun (DinarStandard, 2026). Meskipun demikian, Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam *Global Islamic Economy Indicator* edisi 2025/26, di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.



Temuan tersebut menunjukkan bahwa besarnya potensi pasar tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi keunggulan kompetitif tanpa didukung penguatan ekosistem domestik (DinarStandard, 2026).bangan industri, sertifikasi halal, logistik, digitalisasi, dan ekspansi perdagangan internasional.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, basis UMKM yang kuat, serta sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat perannya sebagai pemasok produk halal dunia, khususnya pada sektor makanan dan minuman halal, fesyen muslim, kosmetik halal, farmasi halal, serta produk berbasis pertanian dan perikanan. Namun, peluang tersebut tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal apabila pengembangan UMKM masih berfokus pada penyediaan pembiayaan semata. UMKM memerlukan ekosistem yang menghubungkan pembiayaan dengan kepastian pasar, pengembangan industri, sertifikasi halal, logistik, digitalisasi, dan ekspansi perdagangan internasional.

3 *Strategic Insights*: Roundtable Discussion Dampak *Geopolitical Turbulence* terhadap Resiliensi UMKM di Indonesia

Bagian ini membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia setelah terjadinya *geopolitical turbulence*, terutama sejak awal tahun 2026. Bagian ini merupakan hasil *Roundtable Discussion* yang melibatkan regulator, industri jasa keuangan, akademisi, organisasi masyarakat, dan pelaku UMKM yang diselenggarakan oleh LP UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yayasan Bakti Masyarakat Ekonomi Syariah, serta Menara Syariah. Hasil diskusi ini juga menjadi dasar penyusunan agenda transformasi kebijakan pada bagian selanjutnya.

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, dampak *geopolitical turbulence* terhadap UMKM tidak berhenti pada meningkatnya harga energi, pelemahan nilai tukar, maupun gangguan rantai pasok global. Namun demikian, indikator makroekonomi belum sepenuhnya mampu menjelaskan bagaimana perubahan tersebut dirasakan secara nyata oleh pelaku UMKM maupun efektivitas berbagai kebijakan yang telah dijalankan pemerintah.

Untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif, LP UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bersama Yayasan Bakti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Menara Syariah menyelenggarakan *Roundtable Discussion* yang melibatkan regulator, industri jasa keuangan, akademisi, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan praktisi ekonomi syariah. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang mengukur besarnya dampak melalui indikator statistik, diskusi ini bertujuan menggali persepsi, pengalaman lapangan, serta pandangan strategis para pemangku kepentingan. Hasil diskusi menunjukkan adanya konsistensi pandangan di antara para peserta yang mengarah pada lima *strategic insights* berikut:

3.1. Keterbatasan Akses Pasar Bukan Hanya Keterbatasan Pembiayaan

Selama lebih dari dua dekade terakhir, perluasan akses pembiayaan menjadi fokus utama berbagai kebijakan pemerintah melalui skema seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan pembiayaan syariah. Namun demikian, para peserta menilai bahwa dalam kondisi *geopolitical turbulence*, tambahan pembiayaan tidak lagi secara otomatis mampu meningkatkan kinerja UMKM. Persoalan yang lebih mendesak justru terletak pada kemampuan UMKM memperoleh pasar yang berkelanjutan.

LP UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah menekankan bahwa banyak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sesungguhnya mampu memproduksi barang dan jasa, namun mengalami kesulitan mengembangkan usahanya karena keterbatasan akses pasar dan rendahnya nilai tambah yang diperoleh. Pandangan serupa disampaikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menekankan pentingnya mengantisipasi *second-round effect*, yaitu melemahnya aktivitas industri pengolahan yang menjadi pasar maupun rantai pasok UMKM, dan bukan hanya *first-round effect* berupa kenaikan biaya produksi. Menurut BSI, keberhasilan pembiayaan UMKM harus diukur berdasarkan kemampuannya menghubungkan pelaku usaha dengan *off-taker* dan rantai nilai industri, bukan semata-mata besarnya pembiayaan yang disalurkan.

Di sisi lain, perwakilan dari Bank Syariah Matahari menyoroti pentingnya pemetaan kebutuhan pasar sebelum memberikan pelatihan maupun pembiayaan. Hal ini disebabkan karena banyak UMKM bergerak pada sektor yang sama tanpa didukung analisis permintaan yang memadai. Pandangan senada juga dikemukakan oleh kalangan Wirausaha Muhammadiyah. Mereka menilai bahwa pemerintah seharusnya lebih berfokus menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, memperkuat jejaring pemasaran, serta menghubungkan produk UMKM dengan jaringan distribusi modern.

Temuan ini menunjukkan perubahan paradigma penting: orientasi kebijakan pengembangan UMKM perlu bergeser dari pendekatan berbasis pembiayaan (*financing-led development*) menuju pendekatan yang menempatkan penciptaan pasar (*market-led development*) sebagai penggerak utama pertumbuhan UMKM.

3.2. Perlunya Ekosistem UMKM yang Terintegrasi

Berdasarkan diskusi pada *Roundtable Discussion*, para peserta mengakui bahwa selama dua dekade terakhir pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan, mulai dari pembiayaan, subsidi bunga, penjaminan kredit, digitalisasi, sertifikasi halal, pelatihan kewirausahaan, hingga pengembangan koperasi. Namun, berbagai program tersebut dinilai masih berjalan secara sektoral dan belum membentuk ekosistem yang saling terhubung.

Dalam diskusi tersebut, perwakilan KNEKS menekankan bahwa persoalan bukan terletak pada jumlah program, melainkan belum adanya mekanisme yang menghubungkan seluruh program menjadi proses pengembangan usaha yang berkesinambungan. Misalnya, banyak hasil riset perguruan tinggi mengenai kemasan ramah lingkungan berbahan singkong atau bahan baku tekstil alternatif yang berhenti pada publikasi ilmiah. Tetapi, hasil temuan tersebut belum berhasil diterapkan dan digunakan oleh masyarakat ataupun industri.

Dari sudut pandang praktisi perbankan, utusan dari Bank Syariah Matahari menilai bahwa pelatihan yang selama ini diberikan sering belum didasarkan pada kebutuhan riil pelaku usaha maupun potensi ekonomi daerah. Sementara itu, perwakilan dari LP UMKM Muhammadiyah membandingkan dengan pengalaman Tiongkok yang mendukung pengembangan UMKM melalui pemetaan potensi wilayah, pembinaan kompetensi, dan penguatan rantai pasok sesuai karakteristik daerah.

Pada dasarnya, beberapa inisiatif serupa sudah dilakukan. Perwakilan Bank Syariah Indonesia (BSI) menyampaikan bahwa peran lembaga keuangan tidak hanya terbatas pada penyediaan pembiayaan, tetapi juga mencakup penguatan ekosistem pemberdayaan UMKM. Berbagai program seperti Desa BSI, UMKM Center, platform pelatihan digital, Lapak BSI, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses *off-taker* dirancang untuk memperkuat kapasitas usaha sekaligus memperluas akses pasar. Pendekatan ini dinilai lebih berkelanjutan karena mengintegrasikan layanan pembiayaan dengan pengembangan kapasitas usaha dan konektivitas pasar dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

Roundtable discussion menyimpulkan bahwa paradigma pengembangan UMKM perlu bergeser dari pendekatan berbasis program *(program-based approach)* menuju pendekatan berbasis ekosistem *(ecosystem-based approach),* di mana keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari jumlah program yang dijalankan, tetapi dari kemampuan berbagai instrumen kebijakan untuk bekerja secara terpadu dalam meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, serta mendorong UMKM naik

kelas. Pergeseran paradigma ini sejalan dengan literatur internasional yang menekankan pentingnya integrasi kebijakan dalam ekosistem UMKM, termasuk penguatan keterhubungan antara pembiayaan, kapasitas usaha, dan akses pasar (OECD, 2018; World Bank et al., 2017).

3.3. Bank Syariah Sebagai Penggerak Ekosistem Halal

Para peserta *Roundtable Discussion* mengapresiasi berbagai inisiatif industri perbankan syariah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Meskipun demikian, kontribusi perbankan syariah masih didominasi oleh fungsi intermediasi keuangan. Sementara, potensinya sebagai penggerak ekosistem ekonomi syariah belum dimanfaatkan secara optimal.

Sejalan dengan pendapat tersebut, perwakilan Bank Syariah Indonesia menekankan bahwa pembiayaan UMKM tidak dapat berhenti pada penyaluran kredit semata, melainkan harus diikuti proses inkubasi usaha, pendampingan, peningkatan kapasitas, serta menghubungkan UMKM dengan *off-taker* yang mampu menyerap produk secara berkelanjutan. Pernyataan ini diperkuat oleh perwakilan dari Bank Indonesia. Perwakilan Bank Indonesia tersebut juga menekankan pentingnya pengembangan model pembiayaan syariah yang lebih beragam dan tidak hanya bertumpu pada akad murabahah, tetapi juga memperluas pemanfaatan akad salam, musyarakah mutanaqisah, serta skema *blended financing*. Hal tersebut juga sejalan dengan penguatan integrasi pembiayaan syariah dengan program pemerintah seperti KUR Syariah serta pengembangan *halal value chain* pada sektor makanan halal, fesyen muslim, kosmetik halal, dan industri kreatif syariah.

Dari sisi regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperkuat kerangka kebijakan pembiayaan UMKM melalui penguatan tata kelola dan manajemen risiko, penyederhanaan persyaratan pembiayaan, serta pengembangan pemanfaatan data alternatif dalam penilaian kelayakan kredit. Regulasi ini juga mendorong inovasi skema pembiayaan UMKM untuk mempercepat akses pembiayaan yang lebih mudah, cepat, murah, dan inklusif. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pengawasan dari fokus semata pada stabilitas sektor jasa keuangan menuju penguatan fungsi intermediasi yang lebih inklusif dan mendukung perluasan akses pembiayaan bagi UMKM.

Meskipun demikian, para peserta mengidentifikasi sejumlah ruang perbaikan. Perwakilan Muhammadiyah yang berasal dari tokoh masyarakat dan pernah menjadi anggota parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) menekankan bahwa perhatian terhadap rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*/NPF) tetap penting, namun tidak boleh mengurangi keberpihakan lembaga keuangan terhadap pengembangan UMKM. Di sisi lain, Sekretaris Jendral LP UMKM Muhammadiyah menilai bahwa dalam praktiknya, skema seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih lebih mudah diakses oleh pelaku usaha yang telah berkembang. Sementara, usaha yang baru dirintis menghadapi berbagai persyaratan yang relatif sulit dipenuhi. Isu ini juga perlu menjadi perhatian karena di tengah gejolak politik dan ekonomi, dan di saat peluang kerja yang tersedia terbatas, modal bagi generasi muda yang baru ingin berusaha juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Isu lain yang mendapat perhatian adalah optimalisasi keuangan sosial syariah. Perwakilan Bank Syariah Indonesia menjelaskan bahwa program *qardhul hasan* berbasis masjid telah memberikan alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro yang sebelumnya bergantung pada rentenir maupun pinjaman daring ilegal. Berdasarkan data, dana sosial syariah dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi apabila dikelola secara profesional. Pernyataan ini juga didukung oleh perwakilan dari Baitul Tamwil (BTM) Muhammadiyah. Perwakilan BTM Muhammadiyah menambahkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah memiliki kedekatan lebih tinggi dengan masyarakat dibandingkan perbankan, namun ruang geraknya masih dibatasi oleh ketentuan regulasi dan keterbatasan sumber pendanaan, sehingga sinergi antara bank syariah, BPRS, BMT, dan koperasi syariah perlu diperkuat.

Berdasarkan diskusi tersebut, secara keseluruhan, *Roundtable Discussion* menegaskan bahwa bank syariah perlu berkembang menjadi integrator ekosistem halal yang menghubungkan pembiayaan, sektor riil, inovasi, keuangan sosial syariah, *off-taker*, serta akses pasar domestik maupun internasional. Hal ini perlu dilakukan jika perbankan syariah ingin mendapatkan dukungan dan insentif lebih besar dari pemerintah yang pada akhirnya juga bisa mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang lebih cepat dan lebih kuat.

3.4. Geopolitical Turbulence sebagai Momentum Transformasi

Dalam diskusi *Roundtable Discussion*, para peserta diskusi tidak memandang *geopolitical turbulence* semata-mata sebagai sumber risiko, karena perubahan geopolitik diperkirakan akan berlangsung dalam jangka panjang sehingga strategi yang hanya berorientasi pada mitigasi dampak jangka pendek dinilai tidak lagi memadai. Namun demikian, *geopolitical turbulence* harus dijadikan momentum agar UMKM mampu berdiri sendiri, berusaha menjadi lebih kuat dan *resilience* terhadap setiap tantangan yang dihadapi.

Dalam diskusi tersebut, tokoh senior dan juga pimpinan Muhammadiyah menjelaskan bahwa UMKM yang menggunakan bahan baku lokal terbukti relatif lebih mampu bertahan dibandingkan UMKM yang bergantung pada bahan baku impor, sehingga penguatan industri berbasis sumber daya domestik menjadi strategi penting untuk meningkatkan ketahanan UMKM. Hal ini sejalan dengan temuan perwakilan dari Bank Indonesia. Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan UMKM tidak lagi semata-mata pada kemampuan bertahan menghadapi krisis, tetapi pada kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan usaha melalui inovasi, peningkatan produktivitas, dan penangkapan peluang pasar baru.

Sejalan dengan itu, perwakilan dari KNEKS berpandangan bahwa meningkatnya harga bahan baku impor seperti plastik dan benang seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat inovasi nasional. Hal ini disebabkan, Indonesia telah memiliki berbagai hasil riset mengenai kemasan ramah lingkungan dan bahan baku tekstil alternatif berbasis sumber daya lokal. Akan tetapi, temuan-temuan ini belum diimplementasikan secara luas.

Di sisi lain, salah satu peserta diskusi yang merupakan penggerak ekonomi syariah generasi awal menyampaikan pandangan yang lebih visioner dengan mencontohkan keberhasilan kebijakan *One Village One Product* di Thailand serta transformasi pedesaan di Korea Selatan sebagai model integrasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang dapat diadaptasi Indonesia melalui pengembangan produk unggulan

daerah. Meskipun pendekatan ini pernah dilakukan di beberapa daerah, belum ada usaha dari pemerintah yang betul-betul serius menjadikan *One Village One Product* ini menjadi kebijakan nasional yang masif digerakan di seluruh Indonesia.

Dari keseluruhan diskusi, para peserta memiliki optimisme yang sama bahwa perubahan struktur ekonomi global membuka peluang bagi Indonesia untuk mempercepat hilirisasi industri, meningkatkan penggunaan bahan baku lokal, memperkuat inovasi berbasis riset. Hal ini berguna dalam mengembangkan industri halal serta memperluas partisipasi UMKM dalam rantai nilai domestik maupun global untuk menjadikan Indonesia sebagai penggerak pertumbuhan pasar halal dunia.

3.5. Pentingnya *National Development Agency*

Dalam diskusi pada *Roundtable Discussion* tersebut, para peserta mengakui bahwa hampir seluruh kementerian, lembaga, regulator, industri jasa keuangan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta telah menjalankan berbagai program sesuai kewenangan masing-masing. Namun demikian, berbagai inisiatif tersebut dinilai masih berjalan secara parsial sehingga belum menghasilkan dampak optimal terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM.

Kebutuhan akan adanya *National Development Agency* yang menggerakkan dan mengkoordinasikan berbagai elemen untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal, dengan UMKM sebagai ujung tombak dianggap sebagai suatu kebutuhan mendesak. KNEKS menyampaikan bahwa fungsinya pada dasarnya adalah koordinasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan, sementara implementasi program tetap berada pada masing-masing institusi, sehingga terdapat kesenjangan antara perumusan kebijakan dan implementasi di lapangan. Hal ini dianggap sebagai suatu keterbatasan karena UMKM membutuhkan lembaga yang mampu membuka akses pasar baik dari tingkat lokal maupun global.

Hal ini ditegaskan oleh Peserta dari Muhammadiyah. Beliau menyampaikan bahwa banyak pelaku UMKM memperoleh pelatihan tetapi tidak memperoleh akses pasar. Banyak juga yang telah memperoleh pembiayaan tetapi tidak memperoleh pendampingan usaha, sebagai akibat dari pendekatan yang masih bersifat sektoral.

Di sisi lain, perwakilan dari Bank Indonesia juga menekankan bahwa penguatan ketahanan UMKM memerlukan sinergi berbagai instrumen kebijakan. Sementara itu, perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa regulator terus melakukan penyesuaian kebijakan. Salah satunya Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang belum *bankable*. Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan bahwa setiap institusi telah menjalankan perannya masing-masing. Tetapi, tantangan yang tersisa adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut saling terhubung dan diarahkan pada sasaran pembangunan yang sama.

Dengan demikian, peserta *Roundtable Discussion* menyimpulkan bahwa Indonesia tidak menghadapi kekurangan kebijakan maupun institusi dalam pengembangan UMKM dan ekonomi syariah. Permasalahan yang lebih mendasar adalah belum adanya mekanisme kelembagaan yang secara khusus bertugas mengintegrasikan berbagai kebijakan, mengorkestrasi implementasi lintas sektor, memantau capaian program secara menyeluruh, serta memastikan seluruh instrumen pembangunan bekerja secara sinergis. Dengan kata lain, tantangan yang dihadapi bukan lagi bagaimana merancang program baru, melainkan bagaimana meningkatkan efektivitas tata kelola (*governance*) pengembangan UMKM dan ekonomi syariah secara nasional.

4 Agenda Transformasi Kebijakan

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan UMKM telah bergeser dari keterbatasan pembiayaan menuju persoalan yang lebih kompleks seperti ketahanan rantai pasok, kepastian akses pasar, integrasi industri, dan tata kelola lintas sektor. Oleh karena itu, *Roundtable Discussion* menyimpulkan 5 (lima) agenda transformasi kebijakan yang dipandang perlu menjadi prioritas nasional.

4.1. Menggeser Fokus Kebijakan dari Pembiayaan Menuju Penciptaan Pasar

Orientasi kebijakan perlu bergeser dari *financing-led development* menuju *market-led development*. Pemerintah perlu menempatkan penciptaan pasar sebagai instrumen utama pengembangan UMKM. Hal ini dapat dijalankan melalui penguatan kemitraan antara UMKM dan berbagai *off-taker*, termasuk BUMN, industri besar, rumah sakit, hotel, jaringan ritel modern, koperasi, industri halal, serta eksportir.

Kemitraan tersebut perlu didukung insentif fiskal bagi perusahaan yang secara aktif melibatkan UMKM dalam rantai pasoknya, penyederhanaan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta penguatan kebijakan *local content* dan *affirmative procurement*. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan UMKM tidak lagi hanya diukur berdasarkan besarnya pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga berdasarkan jumlah UMKM yang berhasil memperoleh kontrak usaha jangka panjang, menjadi pemasok industri, serta menembus pasar ekspor.

4.2. Mentransformasi Bank Syariah menjadi Penggerak Ekosistem Halal Nasional

Model pembiayaan bank syariah perlu bergeser dari pembiayaan terhadap pelaku usaha secara individual menuju pembiayaan berbasis *halal value chain*, yang dirancang untuk memperkuat keterhubungan antara petani, nelayan, koperasi, produsen, UMKM, industri pengolahan, distributor, eksportir, hingga *off-taker*. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya menghasilkan peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga didukung kepastian pasar sehingga risiko pembiayaan dapat ditekan.

Bank syariah juga perlu mengintegrasikan pembiayaan komersial dengan instrumen keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, dan *qardhul hasan*, guna menyediakan skema pembiayaan yang sesuai dengan tahapan perkembangan UMKM, mulai dari usaha ultra mikro hingga usaha yang siap berekspansi ke pasar internasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia perlu menjadikan pengembangan *halal value chain financing* sebagai salah satu agenda strategis dalam peta jalan pengembangan perbankan syariah nasional.

4.3. Mengintegrasikan Seluruh Program Pengembangan UMKM ke dalam Satu Ekosistem Nasional

Diperlukan mekanisme yang mampu mengintegrasikan pembiayaan, pelatihan, sertifikasi halal, digitalisasi, inovasi, inkubasi bisnis, logistik, *business matching*, promosi perdagangan, hingga fasilitasi ekspor dalam satu kerangka pengembangan yang berkesinambungan, sehingga setiap UMKM memiliki jalur pengembangan (*business development pathway*) yang jelas sesuai tingkat kematangan usahanya.

Pendekatan berbasis ekosistem ini akan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah karena setiap program tidak lagi berjalan secara terpisah, melainkan saling melengkapi. Keberhasilan kebijakan perlu diukur berdasarkan peningkatan produktivitas, omzet, ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan kenaikan kelas UMKM, bukan sekadar jumlah pelatihan atau besaran anggaran yang disalurkan.

4.4. Mentransformasi KNEKS menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah (BPES)

Selama ini, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah memainkan peran penting dalam memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Namun, meningkatnya kompleksitas tantangan global menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi syariah telah memasuki fase baru, di mana tantangan tidak lagi terbatas pada penyusunan kebijakan, melainkan pada bagaimana memastikan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara terpadu, terukur, dan menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.

Oleh karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan transformasi kelembagaan dari KNEKS menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah (BPES) sebagai *national development agency* di bidang ekonomi syariah, dengan mandat yang lebih luas untuk merancang strategi nasional, mengintegrasikan program lintas kementerian dan lembaga, mengakselerasi implementasi program prioritas, menarik investasi strategis, mengembangkan industri halal, memperkuat pemberdayaan UMKM, serta membangun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil (*impact-based performance management*). Transformasi ini tidak dimaksudkan untuk menambah birokrasi baru, melainkan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah berjalan melalui satu institusi dengan mandat sebagai delivery institution.

4.5. Menjadikan Pergeseran Geopolitik sebagai Momentum Ekspansi Global Industri Halal Indonesia

Banyak negara mulai melakukan diversifikasi sumber impor dan investasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara atau kawasan tertentu, sementara permintaan terhadap produk halal terus meningkat, sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi syariah global menjadi USD3,56 triliun pada 2029 (DinarStandard, 2026). Perubahan tersebut memberikan peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat industri halal dunia, mengingat besarnya basis UMKM, sumber daya alam, dan populasi Muslim yang dimiliki.

Untuk memanfaatkan peluang tersebut sekaligus memperbaiki peringkat Indonesia dalam *Global Islamic Economy Indicator* yang mengalami penurunan pada edisi 2025/26 (DinarStandard, 2026), pemerintah dapat mempertimbangkan penyusunan *National Halal Export Initiative* sebagai strategi nasional yang mengintegrasikan pengembangan UMKM, industri halal, perdagangan internasional, investasi, pembiayaan syariah, serta diplomasi ekonomi. Prioritas pengembangan dapat diarahkan pada sektor makanan dan minuman halal, fesyen muslim, kosmetik halal, farmasi halal, serta produk pertanian dan perikanan yang memiliki keunggulan komparatif. Hal ini juga perlu didukung oleh penguatan sertifikasi halal yang diakui secara internasional, pengembangan kawasan industri halal, peningkatan kapasitas ekspor UMKM, serta skema pembiayaan yang mampu mendukung ekspansi usaha ke pasar global.



5 Penutup

Geopolitical turbulence merupakan realitas baru yang akan terus membentuk arah perekonomian global dalam beberapa dekade mendatang. Persaingan geopolitik antarnegara, fragmentasi perdagangan internasional, perubahan rantai pasok global, transisi energi, serta meningkatnya ketidakpastian pasar diperkirakan akan menjadi karakter utama ekonomi dunia. Dalam situasi tersebut, kemampuan suatu negara untuk bertahan tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya cadangan devisa atau stabilitas sektor keuangan, tetapi juga oleh ketangguhan sektor riil, terutama UMKM yang menjadi fondasi utama aktivitas ekonomi nasional.

Bagi Indonesia, perubahan tersebut menghadirkan dua konsekuensi yang berlangsung bersamaan. Di satu sisi, tekanan harga energi, nilai tukar, dan hambatan perdagangan memberikan tekanan yang semakin besar terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Di sisi lain, restrukturisasi rantai pasok global dan meningkatnya permintaan produk halal membuka peluang strategis yang belum pernah sebesar saat ini. Oleh karena itu, pertanyaan yang dihadapi Indonesia bukan lagi apakah *geopolitical turbulence* akan memengaruhi perekonomian nasional, melainkan apakah Indonesia mampu memanfaatkan perubahan tersebut sebagai momentum transformasi ekonomi.

Policy brief ini menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya telah memiliki fondasi yang kuat. Berbagai program pembiayaan, pemberdayaan UMKM, pengembangan industri halal, dan penguatan ekosistem ekonomi syariah telah berkembang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, meningkatnya kompleksitas tantangan global menunjukkan bahwa pendekatan pengembangan UMKM perlu memasuki fase baru dari penambahan program dan perluasan pembiayaan menuju pembangunan ekosistem yang menghubungkan pasar, pembiayaan, industri, perdagangan, investasi, dan inovasi secara terpadu.

Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah memiliki posisi yang sangat strategis. Prinsip kemitraan, keterkaitan erat antara sektor keuangan dan sektor riil, serta berkembangnya industri halal global memberikan keunggulan komparatif yang tidak dimiliki banyak negara. Potensi tersebut perlu ditransformasikan menjadi keunggulan kompetitif melalui penguatan *halal value chain*, integrasi keuangan komersial dan keuangan sosial syariah, pengembangan industri halal, serta peningkatan kapasitas UMKM untuk berpartisipasi dalam rantai nilai global.

Transformasi tersebut memerlukan kepemimpinan nasional yang kuat serta kelembagaan yang mampu mengorkestrasi implementasi lintas sektor secara efektif sebagaimana diusulkan melalui transformasi KNEKS menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah (BPES). Hal ini disebabkan adanya kebutuhan akan pendekatan yang mampu menyatukan berbagai kebijakan dan program ke dalam satu strategi nasional yang memiliki arah, sasaran, indikator kinerja, serta mekanisme implementasi yang jelas.

Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia dalam menghadapi *geopolitical turbulence* tidak akan ditentukan oleh kemampuan menghindari setiap guncangan global, melainkan oleh kemampuan membangun perekonomian yang adaptif, produktif, dan berdaya saing. UMKM tidak seharusnya dipandang semata sebagai kelompok usaha yang memerlukan perlindungan, tetapi sebagai aset strategis bangsa yang menentukan ketahanan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan kesejahteraan, serta daya saing Indonesia di masa depan.

Di sisi lain, ekonomi syariah seharusnya tidak lagi diposisikan hanya sebagai alternatif sistem keuangan, melainkan sebagai salah satu instrumen pembangunan nasional yang mampu memperkuat transformasi ekonomi Indonesia. Dengan demikian, momentum perubahan global yang sedang berlangsung harus dimanfaatkan sebagai titik awal untuk melakukan lompatan kebijakan, sehingga *geopolitical turbulence* yang selama ini dipandang sebagai ancaman dapat menjadi katalis bagi lahirnya model pembangunan ekonomi baru yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.



Daftar Pustaka

Asian Development Bank. (2019). *Inclusive rural development and value chain strengthening in Asia*. https://www.adb.org/publications/inclusive-rural-development-value-chain-strengthening-asia

Badan Pusat Statistik. (2026a, 1 Juli). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Juni 2026 sebesar 3,34 persen* [Siaran pers]. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/07/01/2590/inflasi-year-on-year--y-on-y--pada-juni-2026-sebesar-3-34-persen-.html

Badan Pusat Statistik. (2026b, 1 Juli). *Berita resmi statistik: neraca perdagangan Mei 2026*. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/07/01/2587/ekspor-dan-impor-indonesia-mei-2026-masing-masing-tercatat-usd-23-20-miliar-dan-usd-24-81-miliar.html

Bank Indonesia. (2025). *Laporan perekonomian Indonesia 2024/2025*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Perekonomian-Indonesia-2024-2025.aspx

Bank Indonesia. (2026a). *Tinjauan kebijakan moneter Juni 2026*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Tinjauan-Kebijakan-Moneter-Juni-2026.aspx

Bank Indonesia. (2026b, 18 Juni). *BI-Rate naik 25 bps menjadi 5,75%: memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah* [Siaran pers]. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2810726.aspx

Bank Syariah Indonesia. (2023). *Laporan tahunan 2023*. https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola-perusahaan/laporan-tahunan

DinarStandard. (2026). *State of the global Islamic economy report 2025/26*. https://www.dinarstandard.com/insights/state-of-the-global-islamic-economy-report-2025-26

International Monetary Fund. (2026). *World economic outlook: global economy in the shadow of war (April 2026)*. https://www.imf.org/en/Publications/WEO

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Insentif fiskal untuk pengembangan UMKM dan produk dalam negeri*. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Stimulus-Fiskal-Dunia-Usaha-Berlanjut

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Laporan perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kebijakan pembiayaan UMKM*. https://kur.ekon.go.id

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2021). *Rencana strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2020–2024*. https://jdih.kemenkopukm.go.id/uploads/dokumen/1663127322_2021pmkukm005.pdf

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM nasional*. https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1720426701_Laporan_Kinerja_Deputi_Bidang_Perkoperasian_Tahun_2023.pdf

Kementerian PPN/Bappenas. (2024). Hilirisasi dan penguatan industri kunci pemerintah atasi ketimpangan ekonomi. https://www.bappenas.go.id

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2019). *Masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019–2024*. https://kneks.go.id

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2023). *Laporan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia*. https://kneks.go.id

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2026). *Laporan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah semester II tahun 2025*. https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/perkembangan-ekonomi-dan-keuangan-syariah-semester-ii-tahun-2025-95b87ddc/detail/

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2024). *Kebijakan pengadaan pemerintah untuk UMKM dan produk dalam negeri*. https://lkpp.go.id

LP UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yayasan Bakti Masyarakat Ekonomi Syariah, & Menara Syariah. (2026). *Laporan hasil roundtable discussion: geopolitical turbulence dan masa depan UMKM Indonesia* (Laporan tidak dipublikasikan).

Organisation for Economic Co-operation and Development & United Nations Industrial Development Organization. (2019). *Integrating Southeast Asian SMEs in global value chains*. https://doi.org/10.1787/016ecfa0-en

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *SME and entrepreneurship policy in Indonesia 2018*. https://doi.org/10.1787/9789264306267-en

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *OECD SME and entrepreneurship outlook 2021*. https://doi.org/10.1787/97a5bbfe-en

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *OECD SME and entrepreneurship outlook 2023*. https://doi.org/10.1787/342b8564-en

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Strategi nasional literasi dan inklusi keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025*. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia*. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2023.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *POJK No. 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan UMKM*. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-19-Tahun-2025-Kemudahan-Akses-Pembiayaan-Kepada-UMKM.aspx

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. https://peraturan.bpk.go.id

United Nations Development Programme. (2018). *Local economic development approaches and inclusive growth*. https://www.undp.org

UN Trade and Development. (2026). *Trade and development foresights 2026*. https://unctad.org/publication/trade-and-development-foresights-2026-global-economy-faces-geopolitical-challenge

World Bank, World Trade Organization, Organisation for Economic Co-operation and Development, Institute of Developing Economies–JETRO, & University of International Business and Economics. (2017). *Global value chain development report 2017: Measuring and analyzing the impact of GVCs on economic development*. World Bank.
‘

World Bank. (2018). *Improving public sector performance: through innovation and inter-agency coordination*. World Bank.

World Bank. (2023). *Global economic prospects*. https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects

World Bank. (2024). *Indonesia economic prospects (June 2024)*. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospect

World Bank. (2026a). *Commodity markets outlook (April 2026)*. https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets